

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Agustini, Sri, 2019. Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Barang dan Jasa dalam Prespektif Hukum Ekonomi, Dalam Jurnal Enslikipedia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang: Vol. 1 (1), Februari 2019.
- Amirudin, 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram: Vol. 8. (1), Mei 2012.
- Ariesto, Sokesto, 2017. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Disajikan Dalam Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto: Agustus 2017.
- Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Banten: Unpam Press.
- Baskoro, Adi, 2009. Analisis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta: 2009.
- Bahran, 2017. Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Prespektif HAM, Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Antasari, Banjarmasin: Vol.17 (2), 2017.
- Effendy, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ervanda Rifqi Priambodo, Miftahul Falah, dan Yoga Pratama Silaban. 2020. Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik PKN STAN, Tangerang: Vol. 1 (1), 17 November 2020.
- Harahap, M.Yahya, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy. O. S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Maulana, Aby (2017). *Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*. Dalam *Jurnal Varia Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Jakarta: Vol. 13. Nomor 2, Oktober 2017.
- Maisari, Rini dan M. Zuhri. 2009. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Banda Aceh: Vol. 4. Nomor 2, Mei 2020.
- Makaro Mohammad Taufik, dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. R. Kurniawan, dan P. Pujiyono, 2018. Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS,

Dalam Jurnal law reform Fakultas Hukum UNDIP,
Semarang: Vol. 14 (1), Maret 2018.

Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Unram Press.

Mulyadi, Lilik, 2003. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Dalam Artikel Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang: 2003.

Nugroho, Hibnu, 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Media Prima Aksara.

-----, 2018. Reversal Burden of Proof on corruption in Indonesia, Jurnal Problems of Legality, Purwokerto: Vol. 140, 2018.

Priyono, B. Herry, 2018. Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspito, Nanang T, dkk, 2017. Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Soemitro Ronny. (1988) Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Syahroni, Muh, M. Alpian Arief, dan Syofyan Hadi, 2020. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15.(2), Januari 2020.

Syamsudin, Aziz, 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Trisia, Siska. 2020. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Makalah Fiat Justitia MaPPI FHUI : Depok. 2020.

Internet :

Banten news, 30 November, Kasus Korupsi Masker di Dinkes Banten. <https://www.bantennews.co.id/agussuryadinata-divonis-6-tahun-penjara-kasus-korupsi-masker-di-dinkes-banten/>. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.

Hukum Online, Begini Syarat Jaksa Boleh Ajukan PK. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-syarat-jaksa-boleh-ajukan-pk-1t61c3513116125?page=all>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>. Diakses tanggal 3 Januari 2023.

Narasi Tunggal, 28 Juni 2022, Jaksa Agung: Pembentukan Jampidmil Sebagai Pelaksanaan Prinsip Single Prosecution System. [https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2089#:~:text=Prinsip%20single%20prosecution%20system%20tercermin,%E2%80%9D%20\(een%20en%20o%20deelbaar](https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2089#:~:text=Prinsip%20single%20prosecution%20system%20tercermin,%E2%80%9D%20(een%20en%20o%20deelbaar). Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Nay, *Keliru*, 25 September 2003, Menyebut Jaksa Tidak Berwenang Menyidik Korupsi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keliru-menyebut-jaksa-tidak-berwenang-menyidik-korupsi-ho18869?page=2>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Persatuan Jaksa Indonesia, Sejarah Persatuan Jaksa Indonesia. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/about>. Diakses tanggal 1 Januari 2023.

Radioidola, 16 Juni 2021. Menakar Implikasi Potongan Hukuman Bagi Mantan Jaksa Pinangki. <https://www.radioidola.com/2021/menakar-implikasi-potongan-hukuman-6-tahun-bagi-mantan-jaksa-pinangki/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Rifa, Bahtiar, 27 Mei 2021. Kejati Banten Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Masker. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5584753/kejati-banten-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-masker-nakes>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

-----, 18 Agustus 2021. Pemenang Tender Masker yang Dikorupsi di Banten Ternyata Satpam. <https://www.bantennews.co.id/agus-suryadinata-divonis-6-tahun-penjara-kasus-korupsi-masker-di-dinkes-banten/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Sidik, Abu Bakar, 7 Mei 2018. Masih Banyak ASN Takut Menjadi PPK. <https://www.medianasional.id/masih-banyak-asn-takut-menjadi-pejabat-pembuat-komitmen-ppk/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

Universitas Esa Unggul, Orang-Orang yang Boleh Menolak Menjadi Saksi. <https://fh.esaunggul.ac.id/orang-orang-yang-boleh-menolak-jadi-saksi/> Diakses tanggal 27 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

-----,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 20021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).

-----,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Peraturan Presiden RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33).

